LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) BPR WELERI MAKMUR TAHUN 2024

BANK WM
PT BPR WELERI MAKMUR

Jl. Majapahit, Ruko Gayamsari No. 17-20 Semarang
TELEPON: 0246733325

BPR WELERI MAKMUR
Jl. Majapahit, Ruko Gayamsari No. 17-20 Semarang
Telepon: 0246733325
Website: www.bprwm.co.id, Email: bprwmsmg@gmail.com

PENJELASAN UMUM

BPR WM memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan Tata Kelola sesuai standar yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), agar BPR WM dapat terus tumbuh berkelanjutan secara wajar menjadi BPR terbaik yang berperan penting dalam mengembangkan perekonomian Jawa Tengah. Dalam menjalankan aktivitas operasionalnya, BPR WM senantiasa memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati- hatian Bank (prudential banking principle). Hal tersebut sudah menjadi kebutuhan BPR WM untuk selalu patuh pada peraturan perundang-undangan, memperhatikan nilai- nilai etika yang berlaku umum dan melaksanakan kegiatan usaha yang berpedoman pada prinsip-prinsip Penerapan Tata Kelola sebagaimana yang diatur dalam:

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah; dan
b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/ SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat;

Dalam menerapkan Tata Kelola, BPR WM senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola, meliputi:

a. Keterbukaan (transparency);
b. Akuntabilitas (accountability);
c. Pertanggungjawaban (responsibility);
d. Independensi (independency); dan
e. Kewajaran (fairness).

LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Ringkasan Hasil Penilaian *(Self Assessment)* Atas Penerapan Tata Kelola

Nama BPR	**BPR WELERI MAKMUR**
Alamat	**Jl. Majapahit, Ruko Gayamsari No. 17-20 Semarang**
Nomor Telepon	**0246733325**
Posisi Laporan	**31 Desember 2024**
Peringkat Komposit	**2**
Predikat Komposit	**Baik**
Kesimpulan / Penjelasan	**Pelaksanaan tata kelola secara umum baik. Hal ini tercermin dari kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola yang telah terpenuhi, efektivitas proses penerapan tata kelola memadai, dan hasil penerapan tata kelola baik. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.**

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Kerry Thamrim
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR WM. 2. Mengelola BPR WM sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. 3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR WM di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 4. Merealisasikan pencapaian semua target-target perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Bisnis. 5. Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha. 6. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor ekstern, pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya. 7. Membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Kepatuhan. 8. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, dengan pemisahan tugas dan tanggung jawab antara unit kerja pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional. 9. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai peraturan perundang-undangan. 10. Mengungkapkan kebijakan strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. 11. Menyediakan data/informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh kepada Dekom. 12. Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi. 13. Memutuskan setiap kebijakan strategis melalui rapat Direksi dengan pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat. 14. Mengungkapkan kepemilikan saham di BPR WM dan perusahaan lain serta mengungkapkan hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham dalam rangka memenuhi aspek transparansi Direksi. 15. Tidak menggunakan BPR WM untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR WM. 16. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR WM, selain yang telah ditetapkan oleh RUPS.		
2.	Nama	:	Kasmiati

Jabatan	:	Direktur

Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan operasional BPR WM.
2. Menerapkan Tata Kelola pada setiap aktivitas operasional BPR WM.
3. Merealisasikan pencapaian target operasional BPR WM.
4. Menumbuhkan dan mewujudkan budaya kepatuhan pada kegiatan operasional;
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor ekstern, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya;
6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, dengan pemisahan tugas dan tanggung jawab antara unit kerja pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional;
7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas operasional kepada Direktur Utama;
8. Menyediakan data/ informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
9. Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi;
10. Mengungkapkan kepemilikan saham di BPR WM dan perusahaan lain serta mengungkapkan hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham dalam rangka memenuhi aspek transparansi Direksi;
11. Tidak menggunakan BPR WM untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR WM;
12. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR WM, selain yang telah ditetapkan oleh RUPS;
13. Mengungkapkan remunerasi dan fasiltas yang diterima dalam Laporan Penerapan Tata Kelola BPR WM.
14. Untuk sementara merangkap sebagai Pelaksana Tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

12 Januari 2024:
1. Peningkatan KYD melalui promo kredit bunga 0,69%, penyaluran kredit perumahan subsidi (FLPP) dan evaluasi kinerja AO, Kepala Kas, Kepala Bisnis, dan Kepala Cabang.
2. Penyelesaian kredit NPL, PH dan AYDA, serta pemberian diskon denda maupun penghapusan denda.
3. Pemantauan rencana tindak bidang PPKB/Monitoring dalam upaya penyelesaian kredit.

29 April 2024:
1. Laba turun disebabkan pemberian bunga kredit murah dan peningkatan NPL. Direksi akan mengevaluasi pemberian kredit promo bunga murah, melakukan upaya penurunan NPL, penyaluran kredit perumahan subsidi/ FLPP, serta mengevaluasi kinerja AO, Kepala Kantor Kas, Kepala Bisnis dan Kepala Cabang.
2. Memaksimalkan penyelesaian kredit NPL, PH dan AYDA serta pemberian diskon bunga dan penghapusan denda.
3. Penyelesaian Kredit Hapus Buku terus dipantau terhadap rencana tindak bidang PPKB.

23 Juli 2024:
1. Penurunan aset disebabkan adanya pencairan tabungan Tamasha Emas bulan April 2024 dan pencairan deposito. Penyaluran kredit yang sehat akan terus ditingkatkan, dengan penyebaran risiko yang lebih merata dan fokus penyaluran pada maksimal 1 milyar rupiah per debitur.
2. Penurunan laba usaha masih disebabkan promo kredit bunga murah dan peningkatan NPL. Direksi terus berupaya untuk menurunkan NPL.
3. Peningkatan NPL masih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang belum stabil, namun penyelesaian kredit NPL, PH dan AYDA diupayakan secara intensif dan maksimal melalui promo bebas denda.

22 Oktober 2024:
1. Laba turun masih dipengaruhi promo kredit bunga murah, peningkatan NPL dan penurunan penerimaan dari kredit Hapus Buku. Direksi terus berupaya untuk menurunkan NPL dan penagihan kredit Hapus Buku.
2. Peningkatan NPL disebabkan oleh kondisi perekonomian yang belum stabil, namun penyelesaian kredit NPL, PH dan AYDA diupayakan secara intensif dan maksimal melalui program pemberian diskon bunga dan penghapusan denda untuk NPL dan PH di tahun 2024 dan Program WM Lunas 2024.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Nihil

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Djoko Sumarno
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		

	1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. 2. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR WM di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 4. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR WM. 5. Tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai operasional BPR WM, kecuali: a. Penyediaan dana kepada pihak terkait; dan b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 6. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti setiap temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/atau otoritas lainnya. 7. Wajib memberitahukan kepada OJK mengenai: a. Pelanggaran perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau b. Keadaan/perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; 8. Memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris. 9. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas secara optimal. 10. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan; dan 11. Meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai suatu permasalahan, kinerja dan kebijakan operasional melalui rapat bersama Dewan Komisaris dengan Direksi.		
2.	Nama	:	Yenny Basuki
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. 2. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR WM di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 4. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR WM. 5. Tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai operasional BPR WM, kecuali: a. Penyediaan dana kepada pihak terkait; dan b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 6. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti setiap temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/atau otoritas lainnya. 7. Wajib memberitahukan kepada OJK mengenai: a. Pelanggaran perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau b. Keadaan/perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; 8. Memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris. 9. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas secara optimal. 10. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan; dan 11. Meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai suatu permasalahan, kinerja dan kebijakan operasional melalui rapat bersama Dewan Komisaris dengan Direksi.		
3.	Nama	:	Gianto Darmawan
	Jabatan	:	Komisaris dan Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. 2. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR WM di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 4. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR WM. 5. Tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai operasional BPR WM, kecuali: a. Penyediaan dana kepada pihak terkait; dan b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 6. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti setiap temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/atau otoritas lainnya. 7. Wajib memberitahukan kepada OJK mengenai: a. Pelanggaran perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau b. Keadaan/perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; 8. Memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris. 9. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas secara optimal. 10. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan; dan 11. Meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai suatu permasalahan, kinerja dan kebijakan operasional melalui rapat bersama Dewan Komisaris dengan Direksi.		

Rekomendasi Kepada Direksi :
Tanggal 12 Januari 2024: 1. Pencapaian KYD posisi 31 Desember turun 3,17% 2. Pencapaian Pendapatan kredit PH 93.07%, turun 29,57% dibanding tahun sebelumnya. 3. NPL mengalami kenaikan sebesat 7,97% Tanggal 29 April 2024: 1. Pencapaian Laba usaha turun, periode TW1 tahun 2024 sebesar 58.61% dari anggaran. 2. Beban Bunga Deposito meningkat 11.95%, Deposito meningkat 4.04%, Secara keseluruhan penghimpunan DPK (DPK non Bank dan Simpanan Bank Lain) pada TW I tahun 2024 naik sebesar 2.17% dari TW I tahun 2023. 3. KYD naik sebesar 0.43% sementara Pendapatan Bunga KYD Kepada Pihak III non Bank turun sebesar Rp1.832.698.262. Tanggal 23 Juli 2024: 1. Pencapaian Aset 96.49% dari target anggaran, sehingga perlu upaya peningkatan aset melalui ekspansi penyaluran kredit. 2. Pendapatan operasional sebesar Rp1,228,888,647 dipengaruhi oleh turunnya pos Pendapatan Bunga Kredit yang Diberikan Kepada Pihak III non-Bank dan pos Penerimaan kredit PH, Direksi agar melakukan peningkatan kredit dan tetap menjaga tingkat kualitas kredit yang sehat. 3. Terjadi tren kenaikan rasio NPL bruto pada triwulan II 2024 sebesar 17.60% dibandingkan tahun sebelumnya, Direksi agar memantauan pasca pencairan kredit guna dan perbaikan kualitas kredit bermasalah, misalnya restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah. . Tanggal 22 Oktober 2024: Pencapaian laba yang semakin rendah dipengaruhi oleh penerimaan aset produktif yang dihapus buku yang sedikit dan pendapatan bunga dari kredit tidak maksimal. Perlu evaluasi strategi pendanaan dan manajemen aset produktif untuk meningkatkan kinerja pada kuartal berikutnya. a. Pos Pendapatan bunga dari pihak III non bank turun sebesar Rp3,100,672,079, perlu konsistensi pemantauan secara berkala terhadap portofolio debitur. b. Pos Penerimaan Aset Produktif yang dihapusbuku turun sebesar Rp1,290,833,911. perlu upaya yang tepat dalam penagihan rutin dan pemberian potongan bunga atau denda untuk pelunasan kredit Hapus Buku.
Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	1. Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit; dan 2. Pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut hasil audit.
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	1. Evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan BPR WM; dan 2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko.
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Membantu pelaksanaaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris terkait dengan remunerasi dan nominasi.
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	

A. Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit:
1. Menyusun rencana kerja tahunan untuk pengawasan audit internal;
2. Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas pelaksanaan audit;
3. Melaporkan hasil evaluasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris;
4. Melakukan evaluasi atas laporan audit internal yang dilakukan oleh SKAI pada semester kedua tahun 2024;
5. Temuan audit telah ditindaklanjuti oleh auditee dan terpantau melalui aplikasi IASS; dan
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan komite Audit kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

B. Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko:
1. Meninjau kebijakan manajemen risiko setiap semester;
2. Memastikan pelaksanaan mitigasi risiko telah sesuai dengan ketentuan dan kerangka kerja yang ditetapkan;
3. Melaporkan temuan dan rekomendasi terkait risiko strategis kepada Dewan Komisaris
4. Melakukan evaluasi terhadap laporan Profil Risiko Semester I tahun 2024;
5. Evaluasi terhadap manajemen risiko serta penilaian tingkat kesehatan bank semester 1 tahun 2024; dan
6. Memyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan manajemen risiko dan memberikan rekomendasi dalam rapat dengan Dewan Komisaris dan Direksi.

C. Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi:
1. Merancang prosedur remunerasi honorarium Dewan Komisaris dan Direksi serta merancang syarat sebagai nominasi Direksi dan Komisaris.

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.	Gianto Darmawan	Tata kelola organisasi dan Pengawasan kinerja bank.	Ketua (Komite Audit) Ketua (Komite Pemantau Resiko) Anggota (Komite Remunerasi)	Iya
2.	Soejono Poetro	BSMR Tingkat 1 Manajemen Risiko Perbankan.	Anggota (Komite Audit) Anggota (Komite Pemantau Resiko)	Iya
3.	Singgih Widyatmoko	- Pengalaman di bidang Audit Intern Perbankan selama 10 tahun - Memiliki Certified Accountant - Berpengalaman sebagai auditor ekstern maupun intern	Anggota (Komite Audit) Anggota (Komite Pemantau Resiko)	Iya
4.	Djoko Sumarno	Tata kelola organisasi dan Pengawasan kinerja bank.	Ketua (Komite Remunerasi)	Iya
5.	Esti Widyaningrum	Manajemen Sumber Daya Manusia dan Perumusan Remunerasi.	Anggota (Komite Remunerasi)	Iya

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite	:	Tindak lanjut rekomendasi: 1. Komite Audit; Melakukan evaluasi atas laporan audit internal yang dilakukan oleh SKAI pada semester kedua tahun 2024; Melakukan pemantauan tindak lanjut atas temuan audit telah ditindaklanjuti oleh auditee; dan Menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan komite Audit kepada Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Komite Pemantau Risiko; Mengevaluasi laporan Profil Risiko Semester I tahun 2024; Mengevaluasi penerapan manajemen risiko serta penilaian tingkat kesehatan bank semester 1 tahun 2024; dan Memyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan manajemen risiko dan memberikan rekomendasi dalam rapat dengan Dewan Komisaris dan Direksi. 3. Komite Remunerasi dan Nominasi. Memberikan rekomendasi honorarium Dewan Komisaris dan Direksi serta merancang syarat sebagai nominasi Direksi dan Komisaris dalam RUPS.

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit

	Program	:	1) Menyusun rencana kerja tahunan untuk pengawasan audit internal. 2) Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas pelaksanaan audit. 3) Melaporkan hasil evaluasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris
	Realisasi	:	1) Telah dilakukan evaluasi atas laporan audit internal yang dilakukan oleh SKAI pada semester kedua tahun 2024. 2) Tindak lanjut atas temuan audit telah ditindaklanjuti oleh auditee dan termonitor dengan baik, oleh bagian-bagian terkait di dalam aplikasi IASS 3) Menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan komite Audit kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
	Jumlah Rapat	:	6
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	1) Meninjau kebijakan manajemen risiko setiap semester 2) Memastikan pelaksanaan mitigasi risiko telah sesuai dengan ketentuan dan kerangka kerja yang ditetapkan. 3) Melaporkan temuan dan rekomendasi terkait risiko strategis kepada Dewan Komisaris
	Realisasi	:	1) Evaluasi terhadap laporan Profil Risiko Semester I tahun 2024 2) Evaluasi terhadap manajemen risiko serta penilaian tingkat kesehatan bank semester 1 tahun 2024 3) Memyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan manajemen risiko dan memberikan rekomendasi dalam rapat dengan Dewan Komisaris dan Direksi.
	Jumlah Rapat	:	6
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	1. Merancang prosedur remunerasi honorarium Dewan Komisaris dan Direksi serta merancang syarat sebagai nominasi Direksi dan Komisaris; 2. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi; 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi; 4. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 5. Mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris; dan 6. Mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit serta anggota komite pemantau risiko.
	Realisasi	:	Memberikan rekomendasi honorarium Dewan Komisaris dan Direksi serta merancang syarat sebagai nominasi Direksi dan Komisaris tahun 2025 dalam RUPS.
	Jumlah Rapat	:	1
Penjelasan Lebih Lanjut			

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, bahwa Dewan Komisaris pada BPR dan BPR Syariah yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit:
a. komite audit;
b. komite pemantau risiko; dan
c. komite remunerasi dan nominasi.
Komite yang dibentuk Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Kerry Thamrim	Rp3.524.000.000	5.03%
2.	Kasmiati	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Terdapat 1 (satu) orang Anggota Direksi, yaitu Direktur Utama yang memiliki saham di BPR Weleri Makmur. Saham yang dimiliki sebesar Rp3.524.000.000 atau 5.03%.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Kerry Thamrim	600787	PT. BPR Mandiri Artha Abadi	10%
2.	Kerry Thamrim	-	PT Multi Karya Mitra Sentosa	10%
3.	Kerry Thamrim	-	PT Weleri Makmur Investama	5.03%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Terdapat 1 (satu) Anggota Direksi, yaitu Direktur Utama yang memiliki saham pada 3 (tiga) perusahaan lain, yaitu pada PT BPR Mandiri Artha Abadi sebesar 10%, PT Multi Karya Mitra Sentosa sebesar 10%, dan PT Weleri Makmur Investama sebesar 5.03%.				

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Kerry Thamrim	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Kasmiati	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh Anggota Direksi PT BPR Weleri Makmur tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Direksi lain, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang saham.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Kerry Thamrim	Tidak ada	Tidak ada	Tan Udjan Sugiarto - Ayah Mertua, Hengky Tanto Sugiarto - Kakak Kandung Istri, Tan Dewi Puspa - Istri
2.	Kasmiati	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut :

Terdapat 1 (satu) Anggota Direksi, yaitu Direktur Utama yang memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham PT BPR Weleri Makmur, sebagai berikut:
1. Tan Udjan Sugiarto - Ayah Mertua;
2. Hengky Tanto Sugiarto - Kakak Kandung Istri; dan
3. Tan Dewi Puspa - Istri.

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Djoko Sumarno	Rp0	0%
2.	Yenny Basuki	Rp7.492.000.000	10.7%
3.	Gianto Darmawan	Rp0	0%

Penjelasan Lebih Lanjut :

Terdapat 1 (satu) Anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham di PT BPR Weleri Makmur, yaitu Komisaris Yenny Basuki sebesar 10,7%.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Yenny Basuki	-	PT Weleri Makmur Investama	10.7%

Penjelasan Lebih Lanjut :

terdapat 1 (satu) Anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham pada perusahaan lain.

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan

		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Djoko Sumarno	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Yenny Basuki	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Gianto Darmawan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi, maupun dengan Pemegang Saham.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Djoko Sumarno	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Yenny Basuki	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Gianto Darmawan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lain, Anggota Direksi, maupun dengan Pemegang Saham.				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp462.210.000	3	Rp221.760.000
2.	Tunjangan	2	Rp904.938.845	3	Rp399.461.500
3.	Tantiem	2	Rp197.157.686	3	Rp73.345.500
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp1.564.306.531		Rp694.567.000
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS, yaitu berupa Gaji, Tunjangan, dan Tantiem.					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil Dinas (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	Asuransi Kesehatan (2), BPJS (2)	Asuransi Kesehatan (3), BPJS (3)
4.	Fasilitas Lainnya	Kuota pulsa dan data (2), Pakaian seragam dinas (2)	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Weleri Makmur.			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	3 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	3 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	5 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun.	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	12 Januari 2024	3	1. Pencapaian KYD posisi 31 Desember turun 3,17% 2. Pencapaian Pendapatan kredit PH 93.07%, turun 29,57% dibanding tahun sebelumnya. 3. NPL mengalami kenaikan sebesat 7,97%
2.	29 April 2024	3	1. Pencapaian Laba usaha yang diperoleh bank sebelum pajak pada TW1 tahun 2024 sebesar 58.61% dari anggaran, turun jika dibandingan tahun sebelumnya. 2. Beban Bunga Deposito meningkat 11.95%, Deposito meningkat 4.04%, Secara keseluruhan penghimpunan DPK (DPK non Bank dan Simpanan Bank Lain) pada TW I tahun 2024 naik sebesar 2.17% dari TW I tahun 2023. 3. Secara YoY Triwulan 1 tahun 2023 ke Triwulan 1 tahun 2024

			Kredit yang Diberikan naik sebesar 0.43% sementara Pendapatan Bunga KYD Kepada Pihak III non Bank turun sebesar Rp1.832.698.262.
3.	23 Juli 2024	3	1. Pencapaian Aset belum tercapai, yaitu 96.49%, sehingga perlu langkah/kebijakan untuk peningkatan Aset melalui ekspansi penyaluran kredit. 2. Terjadi penurunan pendapatan operasional sebesar Rp1,228,888,647 dipengaruhi oleh turunnya pos Pendapatan Bunga Kredit yang Diberikan Kepada Pihak III non-Bank dan pos Penerimaan Hapus Buku, maka perlu upaya Direksi untuk melakukan ekspansi kredit dan menjaga tingkat kualitas kredit. 3. Terjadi tren kenaikan rasio NPL bruto di triwulan II 2024 menjadi sebesar 17.60% dari tahun sebelumnya, perlu upaya Direksi untuk pemantauan pasca pencairan guna menjaga kualitas kredit, perbaikan kualitas kredit bermasalah melalui restruktur dan penyelesaian kredit bermasalah.
4.	22 Oktober 2024	3	Terjadi penurunan laba yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, dipengaruhi oleh berkurangnya penerimaan aset produktif yang dihapus buku dan pendapatan bunga dari kredit. Perlu evaluasi strategi pendanaan dan manajemen aset produktif untuk meningkatkan kinerja di kuartal berikutnya. a. Pos Pendapatan bunga dari pihak III non bank turun sebesar Rp3,100,672,079, perlu konsisten monitoring berkala terhadap portofolio debitur. b. Pos Penerimaan Aset Produktif yang Dihapusbuku turun sebesar Rp1,290,833,911. perlu perbaikan dalam penagihan rutin dan potongan bunga atau denda untuk pelunasan kredit Hapus Buku.
5.	10 Desember 2024	7	Rapat Bersama Direksi, Kepala Kepatuhan dan Kepala SKKMR, membahas Rencana Bisnis Tahun 2025
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Pada tahun 2024, Dewan Komisaris melakukan rapat sebanyak 5 (lima) kali, yaitu rapat rutin triwulanan sebanyak 4 (empat) kali dan rapat khusus bulan Desember 2024 membahas tentang Rencana Bisnis Tahun 2025.			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Djoko Sumarno	4	0	100%
2.	Yenny Basuki	4	0	100%
3.	Gianto Darmawan	4	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh Anggota Dewan Komisaris menghadiri rapat Dewan Komisaris tahun 2024				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Selama tahun 2024 tidak terdapat kasus Penyimpangan Internal. Saat ini terus diupayakan peningkatan pengendalian intern yang menyeluruh khususnya bagi pegawai tetap dan tidak tetap.								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	17	0
Dalam Proses Penyelesaian	2	0
Total	19	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Permasalahan hukum yang dihadapi oleh BPR WM selama tahun 2024 sejumlah 19 (sembilan belas) perkara, semuanya perkara perdata. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17 (tujuh belas) perkara atau 89% telah selesai (mempunyai kekuatan hukum tetap), dan terdapat 2 (dua) perkara yang masih dalam proses penyelesaian. Klasifikasi permasalahan hukum perdata berdasarkan pokok perkara: a. Perkara Wanprestasi sebanyak 13 (tiga belas) perkara; b. Perbuatan Melawan Hukum sebanyak 3 (tiga) dengan penanganan pada Pengadilan Tingkat Pertama; c. Perkara Niaga Kepailitan sebanyak 2 (dua) perkara; dan d. Perkara Gugatan Pembagian Waris 1 (satu) Perkara. Dari jumlah permasalahan hukum tersebut posisi BPR WM sebagai: a. Pihak Penggugat sebanyak 13 (tiga belas) perkara; b. Pihak Tergugat sebanyak 4 (empat) perkara yang terdiri dari: 1 (satu) Perkara sebagai Tergugat I, 2 (dua) Perkara sebagai Tergugat II; dan 1 (satu) Perkara sebagai Turut Tergugat III. c. Pihak Kreditur Separatis sebanyak 2 (dua) perkara. Posisi BPR WM sebagai penggugat dalam Gugatan Sederhana untuk perkara-perkara wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.	TAN UDJAN SUGIARTO	Pemegang Saham Pengendali PT BPR Weleri Makmur	KASMIATI	Direktur Operasional	Sewa mobil dinas operasional bank	378 juta rupiah	Transaksi sewa mobil pada tahun 2024 sejumlah 8 (delapan) unit mobil. Pihak yang memiliki benturan kepentingan merupakan pemegang saham pengendali di PT BPR Weleri Makmur.
2.	YENNY BASUKI	Komisaris	KASMIATI	Direktur Operasional	Sewa mobil dinas operasional bank	64 juta rupiah	Transaksi sewa mobil pada tahun 2024 sejumlah 1 (satu) unit mobil. Pihak yang memiliki benturan kepentingan jabatannya sebagai Anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham di PT BPR Weleri Makmur.
3.	TAN DEWI PUSPA	Pemegang Saham PT BPR Weleri Makmur	KASMIATI	Direktur Operasional	Sewa mobil dinas operasional	148 juta rupiah	Transaksi sewa mobil pada tahun 2024 sejumlah 2 (dua) unit mobil. Pihak yang memiliki benturan kepentingan merupakan salah pemegang saham di PT BPR Weleri Makmur dan sebagai istri Direktur Utama PT BPR Weleri

							Makmur.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Pihak yang memiliki benturan kepentingan termasuk para pemegang saham di PT BPR Weleri Makmur dan sebagai istri Direktur Utama PT BPR Weleri Makmur. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan atas sewa mobil pada tahun 2024 sudah melalui survei harga untuk dasar pertimbangan tingkat kewajaran.

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	17 Juni 2024	Sosial	Pemberian hewan qurban di Masjid Sahid Arifin, Surakarta	Masjid Sahid Arifin, Surakarta	Rp3.400.000
2.	17 Juni 2024	Sosial	Pemberian Hewan Qurban di Masjid Nurul Mubin, Teguh Jajar, Sragen	Masjid Nurul Mubin, Teguh Jajar, Sragen	Rp2.750.000
3.	17 Juni 2024	Sosial	Pemberian Hewan Qurban di Masjid Thoriiqul Jannah, Klaten	Masjid Thoriiqul Jannah, Klaten	Rp4.000.000
4.	17 Juni 2024	Sosial	Pemberian hewan qurban di Mushalla Al Muwahhidin, Krajankulon Kaliwungu. Kendal	Mushalla Al Muwahhidin, Krajankulon Kaliwungu. Kendal	Rp3.700.000
5.	17 Juni 2024	Sosial	Pemberian Hewan Qurban Masjid baiturrohim Pati Lor, Pati	Masjid baiturrohim Pati Lor, Pati	Rp3.700.000
6.	17 Juni 2024	Sosial	Pemberian Hewan Qurban di Masjid Baitul Falah, Tegal	Masjid Baitul Falah, Tegal	Rp3.650.000
7.	17 Juni 2024	Sosial	Pemberian Hewan Qurban di Masjid Nurul Muttaqin, Kaliwungu, Kudus	Masjid Nurul Muttaqin, Kaliwungu, Kudus	Rp3.900.000
8.	17 Juni 2024	Sosial	Pemberian Hewan Qurban di Masjid Al Istiqomah, Kota Semarang	Masjid Al Istiqomah, Kota Semarang	Rp3.900.000
9.	17 Juni 2024	Sosial	Pemberian hewan qurban di Masjid Baiturrohman, Ngaliyan, Semarang	Masjid Baiturrohman, Ngaliyan, Semarang	Rp3.900.000
10.	06 Desember 2024	Sosial	Santunan anak yatim di Yayasan AISYIAH, SRAGEN	Yayasan AISYIAH, SRAGEN	Rp1.750.000
11.	06 Desember 2024	Sosial	Santunan anak yatim di Panti Asuhan Muhammadiyah Al Maun, PATI	Panti Asuhan Muhammadiyah Al Maun, PATI	Rp1.000.000
12.	06 Desember 2024	Sosial	Santunan anak yatim di Yayasan Pemeliharaan Bayi Terlantar Wijaya Kusuma, Klaten	Yayasan Pemeliharaan Bayi Terlantar Wijaya Kusuma, Klaten	Rp1.000.000
13.	06 Desember 2024	Sosial	Santunan anak yatim di Panti Asuhan Yatim - Muhammadiyah Hj Siti Rohmah, Kaliwungu,	Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Hj Siti Rohmah, Kaliwungu, Kendal	Rp1.000.000

			Kendal		
14.	06 Desember 2024	Sosial	Santunan anak yatim di Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah, Kota Tegal	Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah, Kota Tegal	Rp1.000.000
15.	05 Desember 2024	Sosial	Santunan anak yatim di Yayasan Bunyanun Marsus Indonesia, Semarang	Yayasan Bunyanun Marsus Indonesia, Semarang	Rp3.500.000
16.	06 Desember 2024	Sosial	Santunan anak yatim di Panti Asuhan Nurul Jannah, Kudus	Panti Asuhan Nurul Jannah, Kudus	Rp750.000
17.	05 Desember 2024	Sosial	Santunan anak yatim di Pondok Pesantren Yatim Piatu dan Dhuafa ADH DHUHA, Surakarta	Pondok Pesantren Yatim Piatu dan Dhuafa ADH DHUHA, Surakarta	Rp1.500.000
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Pada tahun 2024 terdapat 17 (tujuh belas) pemberian dana untuk kegiatan sosial, terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan pemberian hewan qurban dan 8 (delapan) pemberian santunan kepada anak yatim.					

Semarang, 31 Januari 2025

BPR WELERI MAKMUR

Mengetahui,

DJOKO SUMARNO
Komisaris Utama

Menyetujui,

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT WELERI MAKMUR SEMARANG

KERRY THAMRIM
Direktur Utama